***Mata Kuliah : Analisa Politik Luar Negeri***

***Dosen : Andrias Darmayadi, Ph.D***

**FORMULASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI**

 **(Robert Wenzel)**

Kita mesti mengamati (*policy makers focus*) lima langkah dalam perumusan kebijakan:

I. Kita menandai siapa saja/lembaga mana saja yang terlibat dalam urusan luar negeri.

a. *Governmental Agencies*:

1. Kepala Negara (Presiden, Raja PM, Kaisar);
2. Departemen-departemen, lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dalam urusan luar negeri: Deplu, Dephankam, Depkeh, Deperindag, Dep Informasi dan Komunikasi, dll;
3. Lembaga negara lainnya: Lembaga legislatif, lembaga yudikatif.

b. *Non-Governmental Agencies* :

1. Partai Politik, kelompok kepentingan, LSM, yang berusaha untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak bisa menampung aspirasi rakyat.

II. *Determination of Objective*

Penentuan sasaran-sasaran yang akan di capai. Dalam hal ini ada beberapa jenis sasaran, yaitu :

a. *Fundamental Objectives*

1. Berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi dan kepentingan bangsa dan negara yang mencakup : 1) melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat; 2) menjaga kedaulatan dan kemandirian negara;
2. Sasaran yang menyangkut integritas territorial, termasuk persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Penangkalan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa mengganggu sistem kepercayaan dari masyarakat negara yang bersangkutan;
4. Protection terhadap eksistensi sistem politik dan ekonomi dari perubahan-perubahan eksternal yang merusak/negatif.

b. *Middle Range Objectives* (bersifat strategis)

Adalah sasaran-sasaran yang di pengaruhi situasi yang ada di sekitarnya, termasuk pengaruh kawasannya. Klasifikasinya :

1. *Political Objective*. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan mengenai kapabilitas kerjasama maupun bidang pertahanan bangsa juga berbagai perjanjian yang menyangkut hubungan antar pemerintah;
2. *Material Objective*. Berkaitan dengan kebijakan perkembangan ekonomi dan pembangunan, juga berbagai hubungan antara negara industri dan negara berkembang, bantuan, alih teknologi;
3. *Ideological Objective*. Berkaitan dengan kebijakan untuk mempertahankan dan meluaskan (pengaruh) ideologi;
4. *Prestice Objective*. Berkaitan dengan kebijakan/tindakan-tindakan yang mencakup partisipasi/keterlibatan suatu negara dalam berbagai isu internasional. Tingkat pengaruh negara tersebut ikut menentukan/mewarnai dinamika internasional.

c. *Specific Immidate Objective*.

Adalah suatu sasaran yang bersifat khusus dan mendesak. Biasanya berkaitan dengan International change yang terjadi/berlangsung tiba-tiba, atau untuk menghadapi peristiwa internal yang bisa berpengaruh terhadap kepentingan serta posisi suatu negara di dunia internasional.

d. *Resources of Objective*.

Adalah sasaran yang berkaitan dengan pemenuhan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

e. Kepentingan Internal yang bersifat khusus.

f. Berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan persepsi mengenai ancaman dan keamanan nasional.

g. Hal-hal yang berkaitan dengan kesempatan untuk menciptakan keuntungan dari perkembangan situasi yang terjadi di lingkungan eksternal.

h. Berbagai kepentingan untuk menghadapi persoalan-persoalan internasional secara bersama-sama.

i. Perkiraan bahwa persepsi para penentu keputusan yang kemudian mewarnai atau bahkan menentukan kebijakan yang akan diambil pada gilirannya akan memancing respon atau mengundang reaksi-reaksi dari pihak lain.

III. Penafsiran atau Pengukuran Kapabilitas

Lima hal yang bersangkutan yang harus di perhitungkan dalam penafsiran kapabilitas ini:

1. Perhitungan atau perkiraan yang berkaitan dengan elemen-elemen pokok yang bisa menunjang pertahanan/perlindungan terhadap berbagai pengaruh yang muncul dari interaksi antar bangsa;
2. Kualitas/tinggi rendahnya tingkat ke salingmengertian dari hubungan-hubungan yang terjadi;
3. Hal-hal yang mempunyai kedudukan atau arti strategis dalam satu lingkup kebijakan tertentu;
4. Memperhitungkan intensitas dukungan dari pihak-pihak yang terkait/menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah di tentukan serta kesungguhan si pelaku-pelaku tadi;
5. Perhitungan dari masing-masing unsur penunjang/orientasi mereka yang bila memungkinkan di satukan bisa menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi pihak lain.

IV. *Determinant of Orientation* (penentuan orientasi). Memperhitungkan 3 hal :

1. *Non-concerned option* dimana pembuat keputusan tidak secara sungguh-sungguh/tidak menganggap penting hasil yang di peroleh/akibat yang muncul dari suatu peristiwa tertentu;
2. *Concerned option*, option yang menjadi perhitungan tetapi tidak merupakan perhatian utama. Dalam hal ini, unsur-unsur penunjang dari suatu keputusan memperhitungkan/dipengaruhi oleh hasil/dampak dari suatu peristiwa tetapi hal itu tidak terjadi karena kesadaran mereka terhadap pokok-pokok persoalannya;
3. *Issued Option*, opsi yang memperhitungkan masalah-masalah tertentu secara terencana berdasarkan pemahaman terhadap situasi yang terjadi dan berdasarkan keterlibatan untuk meraih suatu tujuan.

V. *External Factors of Capability*

Faktor-faktor eksternal yang menunjang kapabilitas:

1. *Territorial Change*;
2. Ketepatan dalam menentukan bentuk kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral;
3. *Otonomy Limitation*, biasanya di kaitkan dengan tingkat ekonomi dan tingkat kesediaan penunjang kekuatan negara lainnya.

**LANGKAH-LANGKAH EVALUASI POLUGRI**

1. Kita mesti mengungkapkan suatu deskripsi/uraian yang mencakup mulai dari tantangan, hambatan ataupun peluang yang dihadapi oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya;
2. Kita harus berupaya untuk memikirkan/menafsirkan arus informasi dan intelegensi yang mempengaruhi format/bentuk serta persepsi dari para penentu kebijakan dalam urusan dalam negeri;
3. Kita mesti juga bisa mengungkapkan dan menyelidiki problematika sebagai berikut: lembaga/aparat pemerintahan yang manakah yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai hambatan dalam urusan luar negeri dan lembaga/aparat mana pula yang bertanggung jawab apabila upaya pihak pertama menemui kegagalan. Dalam hal ini kita juga harus bisa melihat apakah permasalahan tadi bisa di selesaikan/dipecahkan secara intersection (lembaga) atau mungkin juga dengan bantuan lembaga non-pemerintah bahkan LSM;
4. Kita juga harus bisa mengungkapkan suatu deskripsi yang jelas dari hasil akhir serta juga mengenal hasil akhir/dampak dari suatu kebijakan/pengaruh yang terjadi akibat dari kebijaksanaan. Selain itu, kita harus bisa melihat berbagai penyimpangan/kontradiksi di lapangan/dalam pelaksanaan yang berlainan dengan apa yang sudah di gariskan;
5. Kita juga harus bisa menandai pilihan sikap/tindakan yang secara umum senantiasa di pilih oleh suatu negara. Kita juga harus bisa melihat serta mengkaji bentuk/sifat dan karakteristik penyelesaian yang di jalankan oleh suatu negara dalam menghadapi situasi tertentu dan pada masa/saat tertentu.